


Analisis Dinamika Sosio-Demografi sebagai Acuan untuk Mewujudkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang *Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable*

Surinta B. Sembiring¹

¹ Biro Perencana dan Keuangan - BRIN

Korespondensi: surintas@yahoo.co.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.122> | halaman: 120 - 137

Dikirim: 03-03-2022 | Diterima: 14-03-2022 | Dipublikasikan: 31-03-2022

Abstrak

Cita-cita pembangunan Ibu Kota Negara/IKN dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kota modern yang digerakkan 100 persen energi terbarukan; pengelolaan pembuangan limbah cair, sampah rumah tangga dan sampah industri yang baik dan aman; meminimalkan pencemaran air, tanah dan udara, termasuk membangun jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang dan ruang istirahat para pelaku, dan bangunannya ramah lingkungan serta tahan gempa. Apapun alasan yang dikemukakan tetap memicu kekhawatiran akan terjadinya perubahan yang ditandai dengan transformasi bentang alam. Sejarah juga mencatat bahwa dinamika perubahan bentang alam terutama di pedesaan akan identik dengan persoalan yang bermuatan sosio-demografis. Itulah sebabnya informasi yang terkait dengan sosio-demografis terutama yang menyangkut pola sebaran, pertumbuhan penduduk dengan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan lain sebagainya, termasuk tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia penting diketahui. Berbasis pada ketersediaan data sekunder, terutama yang berasal dari Badan Pusat Statistik baik di daerah maupun dipusat, tulisan ini akan memberikan ulasan kondisi faktual tentang sosio demografi dua Kabupaten yang beririsan langsung dengan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) yang dikaitkan dengan komposisi penduduk berdasarkan kategori Generasi pre-boomer, Generasi baby boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Generasi Z, dan Generasi Post Generation Z.

Kata kunci: Sosio demografi; Kawasan IKN; Penajam Paser Utara; Kutai Kartanegara.

I. Pendahuluan

Paradigma baru yang sedang berkembang dalam pembangunan perkotaan yaitu perkotaan yang tumbuh dan berkembang atas kesadaran sosial akan konsekuensi dari pertumbuhan kota yang tidak terkendali, sehingga membuahkan pemikiran kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan, tidak terlepas dengan penyelenggaraan KTT Rio+20 yang menghasilkan sebuah dokumen yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional yang terkenal dengan "*The Future We Want*". Dokumen tersebut memuat kesepahaman pandangan bersama terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (*common vision*) dan penguatan komitmen politik untuk menuju pembangunan berkelanjutan (*renewing political commitment*).

Kementerian PPN/Bappenas mengajak semua pihak untuk turut aktif menyuarakan, melakukan upaya-upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Bagi pemerintah Indonesia, komitmen pembangunan berkelanjutan juga diperuntukkan bagi perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Bagaimanapun juga IKN harus hadir sekaligus ditargetkan untuk memenuhi kaidah "Kota dengan Komunitas yang Berkelanjutan" (*sustainable cities and communities*) sebagaimana yang dicantumkan pada Target 11 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Secara khusus target 11 yang memuat tentang Kota dan Permukiman yang berkelanjutan harus mengilhami pembangunan IKN-Nusantara yang menghadirkan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.

Secara perencanaan cita-cita pembangunan IKN dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kota modern yang digerakkan 100 persen energi terbarukan; pengelolaan pembuangan limbah cair, sampah rumah tangga dan sampah industri yang baik dan aman; meminimalkan pencemaran air, tanah dan udara, termasuk membangun jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang dan ruang istirahat para pelaku, dan bangunannya ramah lingkungan serta tahan gempa. Oleh karena itu IKN bukan hanya tempat bekerja, tetapi tempat yang aman dan nyaman untuk hidup, sehingga menghadirkan sebuah kota dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Paling tidak ada enam prinsip yang penting diperhatikan, yaitu: (1) memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau; (2) menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan bagi semua; (3) meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan; (4) menguatkan upaya melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia; (5) mengurangi dampak buruk lingkungan di perkotaan dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan manajemen limbah lainnya; dan (6) menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses dan berwawasan lingkungan. Diutamakan bagi perempuan dan anak-anak, lanjut usia dan orang dengan disabilitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Rencana pemindahan ibu kota Jakarta semakin mendapat sorotan setelah Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2019–2024, Ir. Joko Widodo mengumumkan lokasi baru IKN pada pidato kenegaraannya pasca pelantikan 27 Agustus, 2019. Bahkan pada perkembangan berikutnya, Presiden juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa lokasi IKN berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu alasan mendasar karena Jakarta semakin berat memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang dari waktu ke waktu jutaan orang datang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib. Saat ini Jakarta dipadati tidak kurang 11,25 juta jiwa, yang menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 7,95 juta jiwa atau 70,73% penduduk merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Akibat kepadatan dan persoalan sosial demografi yang

lain tidak hanya mengancam kesejahteraan warganya tapi juga memberikan dampak kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah. Bahkan pada tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut akibat dari kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian 67,5 triliun rupiah (Bramono, 2019). Kemudian pada kesempatan yang lain, Presiden secara spesifik telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa lokasi IKN berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal penting lain yang perlu diinformasikan adalah bahwa pembangunan IKN akan menuai opini publik bahkan para ahli dan akademisi, terutama para pemerhati lingkungan yang mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan tidak hanya kelestarian keanekaragaman hayati setempat, tetapi juga persoalan sosial demografi. Misalnya menurut Kyllili & Fokaides (2015) dalam Afrianto, W.F and Fadila Tamnge (2015) berpendapat bahwa ada beberapa persoalan pembangunan perkotaan yang perlu diwaspadai, tidak terkecuali pembangunan IKN, karena akan memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan yang antara lain disebabkan karena pemanasan global, pertambahan penduduk, polusi, dan pemborosan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Kondisi semacam ini tidak hanya berdampak pada degradasi keanekaragaman hayati akan tetapi juga menyangkut persoalan sosio demografi. Oleh karena itu pembangunan perkotaan berkelanjutan juga perlu dan penting mempertimbangkan secara cermat aspek pembangunan sosial dan ekonomi (Mieczysław, A., et.al. 2020). Itulah sebabnya, pembangunan berkelanjutan berpegang pada pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Ketika konsep pembangunan berkelanjutan mengacu pada daerah pedesaan, maka Indonesia sebagai negara agraris perlu mendedikasikan perhatiannya kepada persoalan pertanian yang kuat, desa yang indah dan petani yang kaya. Dengan demikian makna pembangunan berkelanjutan, bagi negara Indonesia yang agraris adalah pembangunan yang direncanakan sebaik mungkin untuk menciptakan suatu kehidupan dengan cara menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang dalam menunjang kehidupan berbangsa (Anonim, 2016). Itulah sebabnya, dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 mengamatkan tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan memberi penegasan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian sebuah dokumen kebijakan yang dirancang secara baik dan sistematis berbasis karakteristik demografi dan sosial ekonomi yang dikaitkan dengan distribusi spasial dapat membantu memberikan pemahaman kepada para perencana dan pembuat kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah (Disanayaka and Kaluthantri, 2007).

Dalam konteks semacam ini informasi yang terkait dengan sosio-demografis terutama yang menyangkut pola sebaran, pertumbuhan penduduk dengan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan lain sebagainya, termasuk tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia penting diketahui. Dengan demikian kesahihan data faktor sosio-demografis seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan dan lain-lain penting dan dibutuhkan untuk berbagai keperluan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan tepat sasaran. Menurut Ariyawansa R G. (2009), dalam sebuah perencanaan yang menyangkut sosio demografi harus memberikan perhatian serius pada aspek-aspek: (1) Struktur umur dan jenis kelamin; (2) Pola migrasi; (3) Status angkatan kerja; (4) Rasio ketergantungan; (5) Pertumbuhan penduduk; (6) Kepadatan penduduk; (7) Kelompok Etnis; dan (8) Rasio fertilitas dan mortalitas dll. Dengan demikian keluaran dan hasil dari sebuah

perencanaan sesuai dengan target yang memenuhi kebutuhan dan keinginan seluruh penduduk di wilayah sasaran secara memuaskan.

Apapun alasan yang dikemukakan tetap memicu kekhawatiran akan terjadinya perubahan yang ditandai dengan transformasi bentang alam. Sejarah juga mencatat bahwa dinamika perubahan bentang alam terutama di pedesaan akan identik dengan persoalan yang bermuatan sosio-demografis. Transformasi tersebut menurut Antrop (2000) tidak hanya menyangkut bagaimana orang memanfaatkan lingkungannya, akan tetapi menurut Hudalah et.al, (2007) secara tidak langsung akan membawa perubahan pola struktur spasial lanskap termasuk akibat ikutannya, yaitu menyangkut persoalan sosio demografi. Misalnya ketika menyangkut persoalan sosio demografi biasanya mengacu pada kombinasi faktor sosial dan demografis untuk menentukan kelompok orang atau populasi tertentu sehingga membantu mengetahui dinamika perubahan yang terjadi pada anggota suatu kelompok atau populasi masyarakat. Oleh karena itu hal penting perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yang menyangkut pola sebaran, pertumbuhan penduduk dengan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan lain sebagainya, termasuk tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Atas dasar pertimbangan di atas, tulisan ini akan mendiskusikan persoalan sosio demografi yang menyangkut kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari berbagai generasi di dua Kabupaten yang beririsan langsung dengan lokasi pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN), yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuannya untuk menyediakan informasi dasar sosio demografi berbagai generasi untuk membantu dan mempermudah proses perencanaan pembangunan di dua lokasi Kabupaten yang beririsan dengan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN). Sebagian besar data diperoleh dan dianalisis berdasar atas publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur (2021), Kabupaten Kutai Kartanegara (2021), dan Kabupaten Penajam Paser Utara (2021), serta beberapa data pendukung lain yang terkait.

II. Metode/Metodologi

2.1. Indonesia dan Pembangunan Ibu Kota Negara

Indonesia, kini sedang menyiapkan sebuah pembangunan Ibu Kota Negara baru sebagai Katalis Peningkatan Peradaban Manusia Indonesia dan sebagai Representasi Kemajuan Bangsa yang unggul. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara. “Nusantara” sebagai nama Ibu Kota Negara Republik Indonesia merupakan representasi konsep yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Harapannya kelak IKN sebagai kota yang menjadi acuan pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Bahkan secara khusus pada pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dinyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia dibangun dan dikelola untuk: (a) menjadi kota berkelanjutan di dunia; (b) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan (c) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal-pasal berikutnya, dinyatakan juga bahwa untuk mencapai tujuan itu, ada tiga hal penting yang harus direpresentasikan dalam tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu:

1) Ibu Kota Nusantara harus mencerminkan identitas bangsa; 2) Ibu Kota Nusantara harus menjamin keberlanjutan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan; dan 3) Ibu Kota Nusantara harus diwujudkan sebagai kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional. Dengan kata lain Ibu Kota Nusantara akan menjadi "kota yang cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan". Ada alasan yang cukup mendasar bahwa Ibu Kota Nusantara dibangun untuk mendorong: (1) asas pemerataan ke arah diluar pulau Jawa. Hal ini sekaligus membangun komitmen untuk tidak bersifat Jawa-sentris tetapi cenderung Indonesia-sentris; (2) memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI; (3) mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah; (4) ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan; dan (5) mengurangi beban Pulau Jawa.

Itulah sebabnya dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pada Lampiran II, dijelaskan bahwa dalam perencanaan IKN perlu ada jalinan konsep berkelanjutan dalam rangka menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial secara harmonis. Dalam konteks ini pula maka prinsip dasar pengembangan IKN harus menempatkan prioritas untuk menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi serta cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, seperti banjir dan kekurangan air baku. Oleh karena itu, prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN yang dituliskan dalam Lampiran II UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN akan memadukan tiga konsep perkotaan, yaitu IKN sebagai kota hutan atau *forest city*, kota spons atau *sponge city*, dan kota cerdas atau *smart city*.

2.2. Dasar Pertimbangan Pemindahan Ibu Kota Negara

Momentum Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Perencanaan pemindahan itu didasarkan pada Kajian yang dilakukan Bappenas, memberi gambaran secara utuh mengapa pemerintah Indonesia memberi prioritas tentang pemindahan Ibu kota Negara. Satu hal yang perlu disadari bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN, sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai IKN dengan optimal. Berbagai faktor menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan IKN. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya Ibukota Negara dipindahkan dari Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta. Kepadatan dan persebaran penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki.

Atas dasar alasan itu, Kementerian PPN/Bappenas berinisiatif untuk menyelenggarakan Dialog Nasional Menuju Ibu Kota Masa Depan. Tujuannya ialah untuk sosialisasi hasil Kajian Awal Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) kepada kalangan yang lebih luas guna mendapat masukan dari pakar dan peserta dialog. Manfaat utama yang akan diperoleh dari kegiatan ini ialah mendapat masukan terhadap pendalaman kajian pemilihan lokasi yang tepat untuk Ibu Kota Negara baru.

Satu diantara serangkaian dialog yang pernah dilakukan, dalam kaitannya dengan persoalan sosial kemasyarakatan dan budaya adalah Dialog Nasional ke VII terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Pada waktu itu tema yang dibahas adalah "Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya". Dialog ini diselenggarakan di Balai Purnomo Prawiro - Universitas Indonesia pada 25 Februari 2020. Selama berlangsungnya dialog tersebut ada beberapa catatan khusus dan penting, yaitu perlunya pencermatan dan penekanan tentang keberagaman kehidupan masyarakat lokal yang antara lain mengenai karakteristik sosial-budaya dan karakteristik sosial-

ekonomi. Untuk itu diperlukan sebuah analisis yang mendalam tentang berbagai permasalahan serta dampak negatif yang ditimbulkan dari pemindahan dan kehadiran IKN terhadap masyarakat lokal sebagai pegangan atau prinsip (*guiding principles*) dalam menentukan kebijakan berbasis pada sosio demografi.

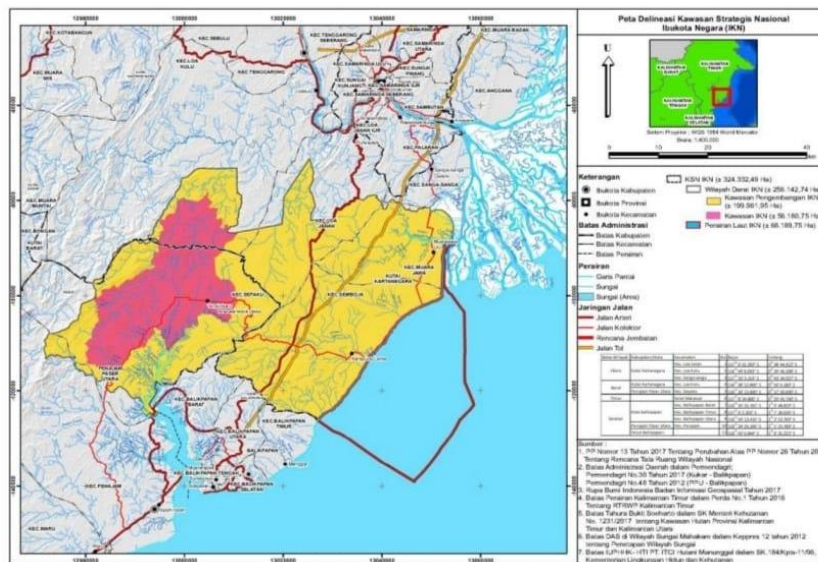
Menurut Deputy Bidang Pengembangan Regional Bappenas, kehadiran IKN ini sudah dapat dipastikan akan berdampak pada perubahan sosial dan budaya, yaitu semakin meningkatnya keberagaman budaya, masalah perekonomian, pendidikan, urbanisasi, terbukanya peluang usaha dan bekerja. Semua itu memerlukan suatu analisis dan perencanaan yang sangat matang agar tidak memicu konflik sosial antar kelompok etnis. Hal yang sama juga pernah disarankan oleh Deputy Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ketika membuka Seminar Nasional "Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Penduduk". Catatan penting yang perlu di garis bawahi bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur jangan sampai menimbulkan marginalisasi terhadap masyarakat lokal sehingga akan memunculkan konflik sosial. Oleh karena itu menurut Kepala Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI yang perlu disikapi adalah melalui strategi perencanaan terhadap mitigasi bencana sosial, walaupun memang tidak dengan sendirinya setiap konflik sosial akan menimbulkan bencana. Hal ini sangat beralasan karena suatu daerah yang pernah terjadi konflik sosial justru dapat menjadi daerah yang resilient terhadap konflik. Ini karena daerah tersebut sudah memiliki pengalaman mitigasi bencana sosial.

Catatan dari LPMP-Jatim (2021) menarik untuk dijadikan landasan pemikiran bahwa hasil sensus 2020 memberikan gambaran demografi Indonesia yang mengalami banyak perubahan dari hasil sensus tahun 2010. Hasil sensus tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa dengan komposisi jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta jiwa (50,58%) sedangkan penduduk perempuan 133,54 juta jiwa (49,42%). Pulau dengan tingkat populasi penduduk terpadat masih berada di pulau Jawa dengan jumlah penduduk sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10% dari penduduk Indonesia. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan sebanyak 58,56 juta jiwa (21,68%). Pulau Sulawesi mempunyai sebaran sebesar 7,36% dan Pulau Kalimantan mempunyai sebaran sebesar 6,15%, sedangkan wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua masing masing sebesar 5,54% dan 3,17%. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48,27 juta jiwa. Urutan berikutnya adalah Provinsi Jawa Timur sebanyak 40,67 juta jiwa. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 0,70 juta jiwa (BPS, 2020).

Untuk mengetahui karakteristik secara umum kondisi sosio demografi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara 2010-2020 dengan penekanan pada variabel kependudukan, ekonomi, kesejahteraan penduduk (pendidikan dan kesehatan) serta ketenagakerjaan. Selain itu, dalam kaitannya dengan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dibawah ini akan dijelaskan beberapa karakteristik demografi dan sosial ekonomi yang dikaitkan dengan distribusi spasialnya. Harapannya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para perencana dalam membuat kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan pembangunan di calon tapak KIKN dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kawasan yang beririsan langsung dengan KIKN (Kawasan Ibu Kota Negara).

2.3. Letak Geografi Dua Kabupaten yang Beririsan Langsung dengan KIKN

Hasil analisis yang dijadikan landasan dalam menentukan letak geografis dua kabupaten yang beririsan langsung KIKN didasarkan atas Peta Deliniasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (KSN-IKN) yang tercantum dalam Lampiran I UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Mengenai total luasan KSN-IKN, seluas 324.332,49 hektar, terdiri atas luas wilayah daratan 256.142,74 hektar ditambah luas perairan laut 68.189,75 hektar. Sementara itu untuk Kawasan Pengembangan seluas 199.961,95 hektar dan Kawasan IKN seluas 56.180,75 hektar. Seluruh wilayah daratan yang luasnya kurang lebih 256.142,74 hektare, tersebar di 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan dengan perincian 15 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku, 21 desa/kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Janan, 2 desa/kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, 7 desa/kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 desa/kelurahan di Kecamatan Penajam. Dalam perencanaannya pelaksanaan pembangunannya, dibagi dalam tiga wilayah perencanaan, yakni: (a) Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare; (b) Kawasan IKN (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56.180,75 hektar; dan (c) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari KIKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare. Khususnya untuk KIKN yang luasnya 56.180,75 hektar itu, sebagian besar berada di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara, utamanya berada di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam. Sedangkan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang tersebar di desa-desa di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibukota Negara

Sumber: Lampiran I UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Secara geografis, Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara $116^{\circ}19'30''$ dan $116^{\circ}56'35''$ bujur timur, dan antara $00^{\circ}48'29''$ dan $01^{\circ}36'37''$ lintang selatan. Sedangkan dalam tata kelola administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dibagi menjadi empat Kecamatan, masing-masing Kecamatan Babulu dengan ibu kota Babulu Darat, Kecamatan Waru dengan ibukota Waru, Kecamatan Penajam dengan ibukota Nipah, Kecamatan Sepaku dengan ibu kota Tengin Baru. Dua dari empat Kecamatan tersebut yang beririsan langsung dengan Ibu Kota

Negara adalah Kecamatan Penajam yang terdiri atas 19 kelurahan dan 4 desa, dan Kecamatan Sepaku terdiri atas 4 kelurahan dan 11 desa.¹ Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Kabupaten ini terdiri atas 18 kecamatan, 44 kelurahan, dan 193 desa. Lima kecamatan di antaranya termasuk dalam perencanaan pengembangan wilayah Ibu Kota Negara yaitu Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, dan satu Kecamatan baru Kutai Kartanegara yakni Samboja Barat. Samboja Barat adalah pecahan dari Kecamatan Samboja.²

2.4. Dinamika Sosio-Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Prinsip dasar (*guiding principles*) yang digunakan untuk analisis sosio demografis kedua kabupaten yang beririsan langsung dengan KIKN, sebagian besar diperoleh dari data BPS tahun 2021 yang diterbitkan baik oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (BPS Kabupaten Penajam Paser Utara 2021) maupun Kabupaten Kutai Kartanegara (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2021). Secara garis besar kedua kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah sekitar 30.596,16 Km² tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 27.263,10 Km² (89,11%) dihuni sekitar 729.382 jiwa, terdiri atas 380.560 laki-laki dan 348.822 perempuan yang seluruhnya tersebar di 18 Kecamatan atau 44 Kelurahan dan 193 Desa. Dengan demikian maka sex ratio antara penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebesar 109. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding 109 orang laki-laki. Sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luasan relatif jauh lebih sempit, hanya sekitar 3.333,06 Km² (10,89%) dihuni sekitar 178.681 jiwa terdiri atas 92.506 laki-laki dan 86.175 perempuan yang seluruhnya tersebar di 24 Kelurahan dan 30 Desa. Dengan demikian maka sex ratio antara penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebesar 107. Namun jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya, menurut Jayani, D.H. (2019), kedua kabupaten ini memiliki tingkatan pertumbuhan penduduk sama yaitu 2,18%. Nilai pertumbuhan ini jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan secara nasional, relatif lebih tinggi. Berdasarkan data secara nasional yang diterbitkan oleh BPS-Kementerian Dalam Negeri (2021), dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010–2020), laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun.

Menarik untuk dicatat bahwa berdasarkan pola sebaran dan kepadatan penduduknya, di Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah penduduk yang terbanyak 106.480 jiwa berada di Kecamatan Tenggarong, sedangkan yang paling sedikit 9.398 jiwa berada di Kecamatan Muara Wis. Sisanya tersebar di 16 Kecamatan, dengan jumlah penduduk bervariasi antara 11.457 jiwa hingga 67.877 jiwa. Sementara itu untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Penajam sebanyak 86.040 jiwa, kemudian berturut-turut di Kecamatan Sepaku 36.357 jiwa, Kecamatan Babulu 36.200 jiwa, dan Kecamatan Waru 20.084 jiwa.

2.5. Komposisi penduduk berdasarkan klaster generasi

Dalam rangka mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, BPS bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rilis bersama Data Sensus Penduduk 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020. Pada kesempatan rilis tersebut komposisi penduduk Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa kategori generasi yaitu pre-boomer (lahir sebelum tahun 1945), baby boomer (generasi yang lahir tahun 1946-1964), generasi X (generasi lahir

¹ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/rencana-kawasan-ikn-baru-di-kalimantan-timur>

² <https://pusaranmedia.com/read/7488/lima-kecamatan-di-kukar-masuk-wilayah-ikn>

tahun 1965-1980), Generasi Milenial (lahir tahun 1981-1996), Generasi Z (lahir tahun 1997-2012), dan Post Generation Z (2013 dst).

Merujuk pada model kluster komposisi penduduk dengan sedikit memodifikasi kelompok umurnya, kedua Kabupaten tersebut memiliki kelompok atau kluster: (a) Post Gen yang lahir tahun 2011 ditambah 9 tahun ke depan (2020); (b) Gen Z adalah penduduk yang lahir antara 1996 - 2010 atau sekitar usia 10 - 24 tahun; (c) Milenial adalah penduduk yang lahir antara 1981 - 1995 atau usia 25 - 39 tahun; (d) Gen X yang lahir 1966 - 1980 atau usia 40 - 54 tahun; dan (e) Baby Boomer yang lahir 1946 - 1965 atau usia 55 - 74 tahun; dan (f) Pre Boomer yang diperkirakan lahir tahun 1945 ke bawah atau usia diatas 75 tahun, di kedua Kabupaten (Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara) tidak memperlihatkan tren yang berbeda (Tabel 1).

Tabel. 1 Kluster Komposisi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (2010, 2015, dan 2020).

KLASTER KOMPOSISI PENDUDUK	KELOMPOK UMUR	KUTAI KARTANEGARA			PENAJAM PASER UTARA		
		Jumlah Penduduk (L = P)			Jumlah Penduduk (L = P)		
		2010	2015	2020	2010	2015	2020
Post Genz Z	0 – 9 tahun	133.813	142.911	148.938	30.575	32.404	33.381
Gen Z	10 – 24 tahun	179.742	188.778	199.119	39.781	41.520	43.294
Millennial	25 – 39 tahun	169.206	188.060	199.601	36.736	40.548	42.563
Gen X	40 – 54 tahun	101.889	130.422	158.171	25.089	31.864	38.191
Baby Boomer	55 – 74 tahun	41.260	60.940	87.757	14.548	21.654	30.780
Pre Boomer	+75 tahun	4.920	6.747	7.547	1.867	1.676	2.170

Jika data hasil sensus ini diturunkan ke kondisi demografi di dua Kabupaten yang beririsan dengan KIKN seperti yang tertera pada Tabel 1 di atas, maka diperlukan pemahaman setiap generasi. Hal ini penting artinya untuk merumuskan dan merencanakan strategi yang terbaik dalam mempersiapkan kualitas SDM lebih baik, dari setiap generasi.

a. Menyiapkan Generasi Z

Menurut para ahli, Generasi Z atau generasi pasca milenial adalah kelompok manusia termuda di dunia saat ini. Mereka lahir dalam rentang 1995 hingga 2010. Jika rentang kelahiran ini diturunkan ke kondisi demografi di dua Kabupaten yang beririsan dengan KIKN seperti yang tertera pada Tabel 1 di atas, maka sebagian besar Generasi Z yang jumlahnya 199.119 jiwa tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, 166.329 jiwa (83,53%) diantaranya masih berstatus sebagai siswa mulai dari tingkatan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 93.956 jiwa (54,49%), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 39.807 jiwa (23,93%), dan sisanya tercatat sebagai siswa di tingkatan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah sebanyak 32.569 jiwa (21,58%). Sementara itu yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, dari total 43.294 jiwa, 39.078 (90,26%) jiwa diantaranya masih berstatus sebagai siswa mulai dari tingkatan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak

21.685 jiwa (55,49%), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 9.438 jiwa (24,15%), dan sisanya tercatat sebagai siswa di tingkatan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah sebanyak 7.955 jiwa (20,36%).

Apa implikasi terhadap dunia pendidikan, pernah dipaparkan oleh Ike Agustina (2018) dalam kesempatan presentasi tahun 2018 di Kampus UII. Karena mereka lahir pada zaman digital maka kehidupan sosial kesehariannya lebih banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya. Oleh karena itu mereka memiliki kecenderungan melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan (multitasking) dan selalu ingin mendapat pengakuan dan memiliki ambisi yang besar. Dalam konteks ini pula maka perencanaan terhadap generasi Z menjadi penting dalam kaitannya dengan dunia pendidikan.

b. Menyiapkan Generasi Milenial

Harries Madiistriyatno & Dudung Hadiwijaya (2019), sepakat dengan berbagai ahli seperti Bencsik, Gabriella & Tímea; Howe & Strauss; Lancaster & Stillman; Martin & Tulgan, yang menyatakan bahwa istilah Generasi Milenial disebut juga Generasi Y meskipun rentang tahun kelahirannya masing-masing berbeda. Di Indonesia, Generasi Millennial ini disebut-sebut sebagai kelompok yang menentukan wajah Indonesia ke depan. Hal ini sangat beralasan dikarenakan dari jumlahnya saja mencapai 69.900.740 jiwa (25,87%) dari total penduduk Indonesia sekitar 270.20 juta pada tahun 2020. (BPS Kementerian Dalam Negeri 2021). Oleh karenanya memahami perilaku milenial sangat penting untuk mendorong mereka agar menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia ke depan.

IDN Research Institute (2019) mengelompokkan generasi millennial menjadi dua, Junior Millennial dan Senior Millennial. Junior Millennial adalah mereka yang lahir pada tahun 1991-1998 dan Senior Millennial adalah mereka yang lahir di antara tahun 1983-1990. Menurut kelompok umur, penduduk Millennial berusia 20-35 mencapai 24 persen, yaitu 63,4 juta dari penduduk kategori usia produktif (14-64 tahun) yang jumlahnya adalah 179,1 juta jiwa (67,6 persen). Jumlah yang cukup signifikan. Generasi millennial akan menjadi tumpuan dan menentukan wajah Indonesia di masa depan.

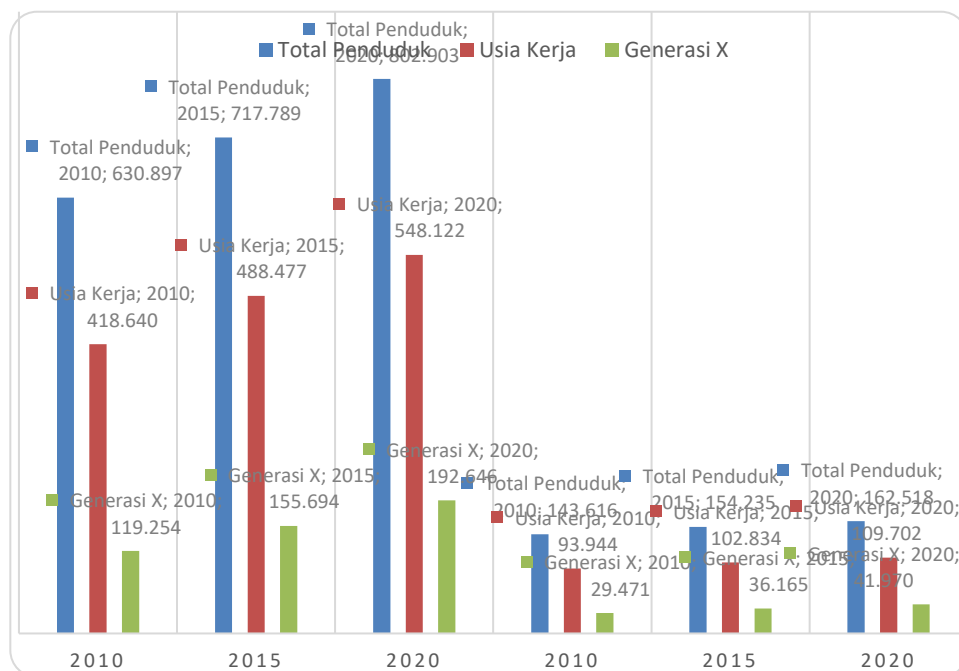
Data BPS Provinsi Kalimantan Timur (2021) dari dua Kabupaten yang beririsan dengan KIKN, dapat dijadikan sebagai panduan dalam menggambarkan sejumlah orang yang dapat digolongkan sebagai Generasi Milenial. Kabupaten Kutai Kartanegara, dari total penduduk yang tercatat tahun 2020 sebanyak 802.903 jiwa. Dari total itu, 199.613 jiwa (24,86 %) diantaranya adalah Generasi Milenial. Sementara itu di Kabupaten Penajam Paser Utara jumlah total penduduk tahun 2020 sebanyak 162.518 jiwa. Dari total itu sebanyak 38.233 jiwa (23,53 %) adalah Generasi Milenial. Secara teoritis, angka-angka ini sekaligus menggambarkan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan life events berikut perkembangannya. Generasi mereka inilah yang perlu disiapkan untuk dijadikan motor penggerak pada awal kegiatan pembangunan KIKN yang segera dimulai pada tahun 2022.

c. Mengakomodasi Generasi X

Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja (working age population) adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 64 tahun. Diantara rentang usia tersebut terdapat sejumlah kelompok yang disebutnya sebagai Generasi X. Sementara ini para ahli sepakat bahwa Generasi X dimulai dari

rentang waktu kelahiran yang bervariasi, yaitu antara tahun 1961 hingga tahun 1965 dan berakhir pada tahun 1975 sampai dengan 1981. Dengan demikian Generasi X yang diperkirakan memiliki kisaran umur 40 hingga 60 tahun. Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari BPS 2021 Provinsi Kalimantan Timur, untuk kedua Kabupaten yang beririsan dengan KIKN, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan data BPS tersebut memperlihatkan bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010, 2015, dan 2020, sekaligus menunjukkan bahwa angka Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) ada kecenderungan tren yang membaik. Walaupun awalnya, pada tahun 2010 masih diatas 50%, dalam perjalanan berikutnya turun dalam kisaran 46% hingga 49% (Gambar 2).



Gambar 2. Potret jumlah penduduk dan pola persebaran berdasarkan kelompok usia kerja dan generasi X di dua lokasi yang beririsan langsung dengan KIKN

Gambar 2 di atas juga memperlihatkan dinamika kependudukan di dua Kabupaten, terutama dalam mencermati Generasi X yang menunjukkan kenaikan jumlah dari waktu ke waktu sejak tahun 2010 hingga 2020. Seperti diketahui bahwa pada rentang umur, baik pada rentang usia kerja (15 - 64 tahun) dan khususnya Generasi X yang memiliki rentang usia 40 hingga 60 tahun. Pada rentang usia tersebut akan menjadi informasi penting dalam persoalan ketenagakerjaan. Berdasarkan data tersebut, sekaligus dapat digunakan untuk mengantisipasi adanya Rencana Induk IKN, yang diamanatkan dalam Lampiran II UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Antara lain menyebutkan bahwa pada tingkat awal pelaksanaan pembangunan KIKN diprioritaskan untuk penciptaan lapangan kerja, terutama yang bertumpu sepenuhnya pada sektor konstruksi. Pada tahap awal ini, penciptaan lapangan kerja diproyeksikan akan banyak menyerap tenaga pada sektor-sektor seperti konstruksi (75 persen), pemerintahan (20 persen), serta layanan pendukung (5 persen). Dengan melibatkan masyarakat lokal,

pertimbangan ketersediaan tenaga lokal diharapkan dapat bermanfaat sebagai penggerak utama dan sekaligus dijadikan sebagai daya ungkit dalam pembangunan ketenagakerjaan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja dan mengatasi tingkat pengangguran terbuka.

Jika kemudian angka yang tergambarkan pada Gambar 2 di atas digabungkan dengan hasil tabulasi secara menyeluruh potret kependudukan di dua Kabupaten tersebut, dapat dimanfaatkan untuk melihat kecenderungan beban ketergantungan penduduk usia bukan angkatan kerja (jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas), terhadap usia angkatan kerja (jumlah penduduk usia 15-64 tahun). Seperti yang tersaji pada Tabel 2 di bawah ini menunjukkan tendensi menurunnya beban tanggungan usia angkatan kerja yang semakin kecil terhadap penduduk usia bukan angkatan kerja.

Berdasarkan atas laporan capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun (2019), bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara umum dengan merujuk pada jumlah penduduk aktif secara ekonomi masih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Dari jumlah total angkatan kerja tahun 2019 sebesar 334.076 orang, sekitar 93.93 % penduduk atau yang bekerja sebanyak 313.784 orang, dan sekitar 6.07% (20.292 orang) adalah pengangguran. Pada umumnya mereka bekerja pada beberapa sektor yang menjadi unggulan Kutai Kartanegara yaitu di Sektor Pertanian dalam arti luas, Industri Pengolahan, dan Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sementara itu, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020, dari jumlah total angkatan kerja sebesar 82.006 jiwa dan penduduk bukan angkatan kerja berjumlah 36.778 jiwa. Dari sejumlah ini, diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69.04% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,22 persen. Pada umumnya, jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 sebanyak 1185. Dari total itu sebanyak 275 orang telah ditempatkan atau mendapat pekerjaan, sedangkan sisanya sebanyak 910 orang masih perlu dicarikan upaya untuk ditempatkan.

Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan masyarakat dapat bekerja pada sektor yang berpendapatan tinggi sehingga bisa mengangkat derajat dan martabat keluarga serta mampu meminimalisir terjadinya kemiskinan. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan crucial problem. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat.

Tabel 2. Beban ketergantungan penduduk usia bukan angkatan kerja terhadap usia angkatan kerja

Kabupaten Kutai Kartanegara				Kabupaten Penajam Paser Utara			KETERANGAN
Kelompok Umur	2010	2015	2020	2010	2015	2020	
0 - 4	68,717	74,257	75,037	15,577	15,816	14,986	usia bukan angkatan kerja
5 - 9	65,120	68,623	73,870	15,004	14,855	14,995	
10 - 14	61,204	65,875	69,160	14,727	14,893	14,664	
15 - 19	59,252	61,986	66,499	13,277	13,050	13,128	usia angkatan kerja
20 - 24	59,313	60,924	63,442	11,773	11,362	11,094	
25 - 29	59,882	63,715	65,114	12,789	12,785	12,252	
30 - 34	57,669	64,208	67,939	12,431	13,004	12,904	
35 - 39	51,671	60,099	66,560	11,523	12,592	13,077	
40 - 44	42,899	52,168	60,455	10,501	11,998	13,039	
45 - 49	33,565	43,568	52,879	8,455	10,313	11,736	
50 - 54	25,412	34,669	44,855	6,128	7,855	9,530	
55 - 59	17,378	25,289	34,457	4,387	5,999	7,665	
60 - 64	11,599	17,851	25,922	2,680	3,876	5,277	
65 - 69	7,360	11,191	17,255	1,781	2,545	3,680	usia bukan angkatan kerja
70 - 74	4,927	6,599	10,113	1,284	1,616	2,321	
75+	4,929	6,767	9,346	1,299	1,676	2,170	
Jumlah	630,897	717,789	802,903	143,616	154,235	162,518	

d. Memperhatikan Generasi Post Gen Z dan Generasi Pre Boomer

Deklarasi Alma-Ata yang ditetapkan oleh International Conference on Primary Health Care (PHC) di Almaty-Kazakhstan, menyarankan kepada pemerintah, pekerja kesehatan, dan komunitas dunia perlu mengambil tindakan segera untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan semua orang dari setiap generasi. Deklarasi ini adalah deklarasi pertama yang menggarisbawahi pentingnya pelayanan kesehatan primer.

Praktek penangan kesehatan masyarakat di Indonesia dilaksanakan dan ditetapkan melalui pembangunan kesehatan yang bertema Program Indonesia Sehat. Program tersebut mengupayakan peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang harus dilaksanakan berdasarkan atas 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sementara itu pilar jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Namun demikian dengan kemunculan isu-isu terkait dengan

bonus demografi memberikan tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Kondisi jumlah penduduk Indonesia terutama jika dikaitkan dengan persoalan penanganan Generasi Post Gen Z dan Generasi Pre Boomer khususnya di kedua Kabupaten yang beririsan dengan KIKN, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya berfokus pada beban harapan hidup penduduk akan tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat. Pada umumnya kedua kabupaten yang beririsan dengan KIKN ini tidak terlepas dari persoalan penyakit menular saja, akan tetapi juga menghadapi emerging disease dengan munculnya wabah covid 19 sebagai penyakit menular baru yang penyebarannya sangat cepat. Dengan kata lain bahwa musibah pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi tantangan yang cukup berat untuk ketercapaian tujuan bidang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana penduduk di kedua Kabupaten yang beririsan dengan KIKN ini memperoleh pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan dasar.

Berkenaan dengan Generasi Post Gen Z, Kabupaten Kutai Kartanegara mencanangkan program penjangkaran pelayanan kesehatan anak usia sekolah secara serentak di sekolah melalui fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas. Dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan sekolah SD, SMP, SMA, dan sekolah sederajat (pesantren dan sekolah swasta). Hampir setiap tahun ajaran baru, misalnya dilakukan pemeriksaan fisik, penilaian status gizi, pemeriksaan gigi dan mulut, THT, deteksi dini/skrining gangguan mental emosional dan psikologis, risiko gaya hidup, gangguan kesehatan reproduksi, modalitas belajar, gangguan perilaku, dominasi otak dan kebugaran jasmani, pembagian obat cacing dan tablet tambah darah. Sementara ini, penjangkaran tingkat SMP dan SMA masih ada yang belum dilaksanakan, dikarenakan kendala penganggaran di Puskesmas. Hasil pelaksanaan penjangkaran Usia Pendidikan Dasar tahun 2020 adalah 97,6%. Dari sasaran penjangkaran Usia Pendidikan Dasar (SD, SMP dan SMA) sebesar 11.159 yang terjaring sebanyak 10.791 (96,7%) (Dinkes Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020). Sementara itu Kabupaten Penajam Paser Utara dalam program penanganan Generasi Post Gen Z, cenderung fokus pada persoalan stunting. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan (2018) yang mencatat kasus stunting berada pada angka 31 persen, artinya jika diasumsikan maka jumlah balita di Penajam Paser Utara sebesar 11 persen% dari total penduduk yaitu sebanyak 18 ribu balita. Dari total jumlah tersebut telah dilakukan sampel pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan sebanyak 30 % atau kurang lebih 5.500 balita dan di dapatkan 1.700 balita yang dinyatakan stunting (humas8/Helena). Berdasarkan data dari Antara (2021), tercatat ada sepuluh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang memiliki kasus stunting, yaitu: Labangka Barat; Babulu Laut; Gunung Makmur Babulu; Sumber Sari; Sri Raharja semuanya dari Kecamatan Babulu, kemudian Binuang; Sukaraja; Karang Jinawi; Tengin Baru dari Kecamatan Sepaku; dan Desa Api-Api dari Kecamatan Waru

Data BPS dua Kabupaten yang beririsan dengan KIKN, juga mencatat masih adanya Generasi Pre Boomer, yaitu generasi yang lahir sebelum 1945 atau yang saat ini sudah berusia lebih dari 75 tahun. Di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data BPS 2021 ada sekitar 9.846 orang atau 1,23% dari total penduduk tercatat sebagai generasi Pre Boomer, sedangkan di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat sebanyak 2.170 orang atau 1,34% dari jumlah penduduk. Berdasarkan pengalaman yang melewati berbagai zaman, merekalah generasi yang berkarakter lebih patriotik, taat hukum, serta

memiliki jiwa yang tangguh karena hidup disaat kondisi perekonomian global dalam situasi sulit akibat perang.

Masih banyak lagi variabel-variabel sosio demografi yang lain yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kesiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN. Seperti yang pernah di wanti-wanti oleh Bappenas bahwa akan ada sekitar 1,5 juta pendatang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI beserta keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah IKN. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang *“Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”*.

III. Kesimpulan

Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik dari setiap generasi di dua kabupaten yang beririsan secara langsung dengan KIKN telah dipetakan. Pemetaan ini penting sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan KIKN yang inklusif dan berkelanjutan melalui pertimbangan kekinian masyarakat lokal dari berbagai tingkatan/generasi.

Pembangunan KIKN tidak hanya menghadapi tantangan besar dalam pembangunan fisik Ibu Kota Negara tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menata masyarakat, baik masyarakat tempatan/lokal yang telah lama bermukim secara turun temurun dua lokasi kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara maupun calon penghuni baru agar dapat berinteraksi dan berakulturasi secara baik dan nyaman. Untuk itu, ada beberapa rekomendasi kebijakan sebagai langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi tantangan ini yaitu:

1. Bagi Generasi Z yang umumnya berstatus sebagai siswa dari berbagai jenjang, mulai Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Pertama/Madrasah Tsanawiah, Sekolah Lanjutan Atas atau Kejuruan/Madrasah Aliyah mendapatkan prioritas bimbingan dan arahan. Dengan bermodal karakter yang multitasking dan selalu ingin mendapat pengakuan dan memiliki ambisi yang besar perlu difasilitasi dengan penerapan pendekatan pembelajaran agar tidak gagap teknologi serta diarahkan dalam menggunakan teknologi yang bersifat aplikatif dan menyenangkan dalam bermedia-sosial online sesuai dengan usianya serta berkontribusi positif dalam pembangunan KIKN. Tujuannya adalah tidak sekadar capaian akademik dan pedagogik siswa, tetapi juga bagaimana proses pendidikan dapat menumbuhkan karakter dan kecintaan siswa terhadap aktivitas belajar.
2. Kepada generasi Milenial di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, sesuai dengan karakternya mereka perlu disiapkan untuk dijadikan motor penggerak pada awal kegiatan pembangunan IKKN yang akan dimulai pada tahun 2022. Pada umumnya mereka adalah generasi yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan dorongan dan motivasi untuk menjalankan model pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada kelembagaan, model bisnis, tata kelola dan manajemen, pengelolaan sumber daya. Tujuannya agar generasi milenial ini siap untuk berkompetisi dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship di era modernisasi di lingkungan IKN yang berstandar internasional.
3. Mengakomodasi Generasi X sebagai penggerak utama dan sekaligus dijadikan daya ungkit dalam pembangunan ketenagakerjaan. Mereka pada umumnya memiliki rentang

usia 40 hingga 60 tahun yang sangat erat kaitannya dengan dunia ketenagakerjaan. Sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang antara lain menyebutkan bahwa pada rentang usia ini diprioritaskan untuk penciptaan lapangan kerja, terutama yang bertumpu sepenuhnya pada sektor konstruksi. Pada tahap awal pembangunan IKN, penciptaan lapangan kerja diproyeksikan akan banyak menyerap tenaga pada sektor-sektor seperti konstruksi (75 persen), pemerintahan (20 persen), serta layanan pendukung (5 persen). Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya untuk menumbuhkan sikap positif individu, keandalan profesionalisme, inisiatif, rasa hormat, integritas, dan rasa syukur.

4. Dalam rangka mengantisipasi Generasi Baby Boomer dan Merawat Generasi Post Gen Z, di dua Kabupaten yang beririsan dengan KIKN, disarankan untuk fokus pada mengupayakan peningkatan derajat kesehatan dan status gizi melalui 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.
 - a. Dalam mengantisipasi keberadaan Generasi Baby Boomer yang secara biologis mulai mengalami proses penuaan (aging process), sehingga secara fisik mulai mengalami degenerasi fungsi dalam tubuhnya, misalnya mengantisipasi persoalan dalam sensoriknya, motorik, mobilisasi dan banyak lagi fungsi fisik lainnya. Oleh karena itu diperlukan perhatian terhadap kesehatannya.
 - b. Sementara itu dalam merawat pesatnya perkembangan Generasi Post Gen Z yang berada pada usia keemasan, maka diperlukan pada perawatan dari aspek perkembangan kognitif, bahasa, moral dan agama, fisik motorik dan sosial emosional yang terjadi pada usia ini.

Keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat akan tetapi pemerintah daerah perlu juga mendorong masyarakatnya agar mampu membangun kesepahaman “ruang bersama” terutama dalam menghadirkan sebuah perencanaan dalam proses transformasi dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya data sosio demografi yang telah tersedia di Badan Pusat Statistik mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat, harus dijadikan sebagai pisau analisis tentang dinamika perubahan struktur sosio demografi yang menyangkut subsistem strategis, subsistem sosial, subsistem ekonomi, subsistem sumber daya dan lingkungan dengan didukung oleh solusi teknologi informasi dalam membangun kesejahteraan bersama di masa depan.

Keberadaan struktur sosial kependudukan yang melibatkan berbagai generasi, mulai dari generasi Post Gen, Gen Z, Millennial, Gen X, Baby Boomer hingga generasi Pre Boomer, dengan karakteristiknya masing-masing perlu dicermati sebaik mungkin sebagai acuan untuk membuat perencanaan dan kebijakan yang menghasilkan win-win solution demi mewujudkan IKN yang “*Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable*”.

Daftar Pustaka

- Agustina, I. (2018). Memahami Generasi Z lebih dekat. <https://pbi.uui.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Presentasi-Materi-Generasi-Z-PBI-UUI-Vian-Ike.pdf> di akses 24 Februari 2022

- Anonim. (2016). Pembangunan Berkelanjutan. <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunan-berkelanjutan>. Diakses 7 Februari 2020.
- Antrop, M. (2000). Changing patterns in the urbanized countryside of Western Europe. *Landscape Ecology*, 15, 257-270.
- Ariyawansa R G (2009) Demographic Characteristics and Planning Challenges: The Case of Colombo City, Sri Lanka. *Journal of Population Studies*, Vol. 11, 2009, pp 93-106
- Badan Pusat Statistik. (2021). Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2021. BPS Penajam Paser Utara. ISSN: 1907-2120. No. Publikasi: 64090.2001. Katalog: 1102001.6409. Dicitak: CV.Suvi Sejahtera
- Badan Pusat Statistik. (2021). Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2021. BPS Kutai Kartanegara. ISSN: 2746-2854. No. Publikasi: 64030.2001. Katalog : 1102002.6403. Dicitak: CV. Mahendra Mulya.
- Badan Pusat Statistik-Kemendagri. (2020). Jumlah Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk tahun 2020. *Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXIV. 21 Januari 2021*
- Bramono, Sandhi Eko. (2019). Menuju Ibu Kota Negara Baru. *Editorial Buletin Ciptakarya edisi 08 Tahun XVII Agustus 2019*.
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. (2019). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2020). Profil Kesehatan Tahun 2020. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.2020
- Disanayaka L and Kaluthantri M (2007), "Demographic Factors Influencing Development Planning: The Case of Monaragala District", *Sri Lankan. Journal of Population Studies*, Vol. 09, pp.86-116
- Hudalah, H, et.all. (2007). Peri-urbanisation in East Asia: A new challengefor planning?. *International Development Planning Review*, 29, 503- 519
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/rencana-kawasan-ikn-baru-di-kalimantan-timurhttps://pusarimedia.com/read/7488/lima-kecamatan-di-kukar-masuk-wilayah-ikn> di akses 9 Februari 2022
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/28/ibu-kota-baru-berapa-jumlah-penduduk-kabupaten-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara>. di akses 9 Februari 2022
- <https://cdn.idntimes.com/content-documents/indonesia-millennial-report-2019-by-idn-times.pdf> di akses 19 Februari 2022
- Jayani, Dwi Hadya. (2019). Ibu Kota Baru, Berapa Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara? Diakses 15 Februari 2022.
- LPMP-Jatim. (2021). <https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/gen-z-pendidikan-harus-bertransformasi>. Di akses 24 Februari 2022.
- Madi Triyatno, H. & Dudung Hadiwijaya. (2019). *Generasi Milenial:Tantangan Membangun Komitmen Kerja/Bisnis dan Adversity Quotient (AQ)*. Diterbitkan oleh Indigo Media. Jl. Kalipasir No. 36 Sukasari, Tangerang 15118.
- Mieczysław, A.; Magdalena, Z. (2020) The "Smart Village" as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland. *Sustainability* 2020, 12, 6503.

Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang No.3 tahun 2022. tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang No.3 tahun 2022. Lampiran I tentang Delineasi Ibu Kota Negara.

Undang-Undang No.3 tahun 2022. Lampiran II tentang Rencana Induk Ibu Kota Negara.